

PENYULUHAN PERTANIAN DI MERAUKE: Kasus Distrik Sota sebagai Taman Nasional dan Wilayah Perbatasan

Demas Wamaer

(Staf Peneliti di BPTP Papua Jayapura)

ABSTRACT

Sota it's one new districts of Merauke regency on 2005. The district is located in Taman Nasional Wasur and RI-PNG (Republic of Indonesia-Papua New Guinea) boundary. The aim of the research is to assess agricultural extention of lokal peasant and to provide the solution by involving 6 - 8 peasant. The approach of the research is Focus Discussion Group (FGD) The result showed that the income is still low in Sota and Yanggandur. Based on the resual, the solution is develop the agriculture sector with involving a various stkehoders (Government and NGO).

Key Words: Agriculture Extention, Taman Nasional Wasur, Boundary

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian erat kaitannya dengan upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya para petani, karena dalam pembangunan pertanian, petanilah yang mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan (Mosher, 1990 dalam Anonimous, 2001: 100). Sumberdaya manusia pertanian yang handal akan menentukan pertanian yang maju (modern), yang menurut Mosher dalam Anonimous (2001: 99) dicirikan oleh (1) teknologi dan efisiensi dari usahatani berkelanjutan terus diperbaiki, (2) jenis komoditas yang diproduksi di lahan pertanian dengan terus menerus berubah sesuai dengan permintaan pasar dan ongkos produksi, (3) kualitas tanah, kemampuan tenaga, lahan pertanian dan kualitas instrumen modal yang digunakan dalam berusahatani secara mantap diperbaiki, (4) perbandingan dikombinasikannya tanah, tenaga dan modal dalam berusahatani selalu berubah untuk menjawab perubahan tingkat pertumbuhan penduduk, perubahan dalam pilihan kesempatan kerja, dan perubahan dalam teknologi lahan pertanian yang tercermin dari meningkatnya harga sebagai faktor produksi, dan (5) lembaga yang melayani petani harus berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang dikembangkannya.

Pertanian modern menurut Mosher adalah pertanian yang sangat dinamis, sangat fleksibel dan produktivitasnya selalu meningkat. Karena itu esensi pembangunan pertanian adalah perubahan terus menerus untuk dapat menjamin penyediaan barang yang diminta masyarakat dan pasar dengan cara yang lebih efisien dan berkesinambungan. Dalam proses perubahan itu usahatani tradisional harus mampu menjadi usahatani modern (Anonimous, 2001: 99). Hal itu dapat terjadi jika penyuluhan pertanian dilaksanakan secara terprogram. Program penyuluhan agar diterima dan membawa perubahan, maka harus mempertimbangkan pula faktor budaya dari petani yang menjadi sasarannya.

Penyuluhan pertanian adalah tugas utama instansi teknis pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam pengembangan bidang pertanian untuk memajukan usaha pertanian di wilayahnya. Untuk itu keberhasilan pertanian di suatu wilayah dapat pula menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan penyuluhan pertanian (Hubeis et al., 1995). Penyuluhan pertanian Indonesia telah dimulai dalam tahun 1970-an sejalan dengan terbentuknya program Bimmas, sedang di Kabupaten Merauke penyuluhan baru digiatkan sejak tahun 1980-an dengan program Gersatera

(Gerakan Desa Sejahtera) yang terfokus pada wilayah perbatasan RI-PNG (Republik Indonesia-Papua New Guinea). Namun dalam perkembangannya penyuluhan hanya terjadi dalam wilayah yang lebih mudah bagi petugas dan petani yang sudah relatif maju terutama petani transmigran nasional (transnas). Hal ini menyebabkan penduduk asli Merauke (translok) belum mengalami kemajuan dibanding saudaranya transnas, terutama penduduk asli suku Malin.

Menurut BP3D Papua (2002), Taman Nasional Wasur (TNW) telah ditetapkan pemerintah melalui keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 1990 dengan areal seluas ± 308.000 ha. Areal ini memiliki daerah dengan topografi datar bergembung ringan dengan ketinggian ter. pat 0-90 meter dpl. Curah hujan terendah 10 mm terjadi antara Juli – November, sedang curah hujan tertinggi 264 mm terjadi pada bulan Januari. Suhu udara rata-rata daerah ini berkisar 22^o – 30^o C. Sebagian besar wilayah TNW ini berupa vegetasi savanna dan sebagian kecil berupa hutan rawa, mangrove, hutan musim, hutan pantai, dan padang rumput. Di sini tercatat tidak kurang dari 80 jenis mamalia (27 diantaranya endemik) dan 391 jenis burung. Satwa tersebut, antara lain: Kanguru (*Walabia agillis*), Dara mahkota (*Coura cristata*), Kasuari (*Casuarius Casuarius*), *Cincinnatius republica*, *Petaurus breviceps*, *Anthechinus melanurus*, dan lain-lain. Dari kondisi tersebut ada kekuatiran mengenai akan terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu menurut Mukmin dalam Hubeis, et al (1995) pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia yang memungkinkan timbulnya masalah sosial ekonomi yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan alam.

Selain itu distrik Sota kabupaten Merauke sebagai wilayah perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG) yang merupakan kawasan penyanggah terhadap

kemungkinan terjadinya gangguan atau boleh jadi terjalannya kerjasama dengan wilayah negara tetangga. Akan tetapi jika wilayah ini masih memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah, dan terbelakang seperti sekarang ini, maka ada kemungkinan bisa menimbulkan berbagai kerawanan sosial-politik. Terutama dalam hal gangguan ketertiban dan keamanan yang biasanya menjadi kendala utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan wilayah perbatasan harus mencakup dua hal, yaitu kesejahteraan dan keamanan (Soegijoko, 1994). Untuk itu peranan penyuluhan pertanian yang mendorong kemajuan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan telah dilakukan pemerintah, namun belum terlihat adanya kemajuan, terutama dari sisi komunitas masyarakat lokal. Dengan demikian pengkajian ini bertujuan untuk mempelajari kearagaan penyuluhan pertanian masyarakat lokal di Merauke dan memberi solusi bagi pengembangan pertanian dalam kawasan TNW dan juga sepanjang wilayah perbatasan RI-PNG.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengkajian ini merupakan bagian dari pengkajian model penyuluhan pertanian penduduk asli Kabupaten Merauke yang dilaksanakan dalam TA 2005, kerjasama BPTP Papua dengan Pemda Tingkat II Merauke. Pengkajian ini dilaksanakan dengan metode penelitian deskriptif dengan teknik survei. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan fokus group diskusi (FGD). FGD adalah salah satu metode pengumpulan data secara partisipatif terhadap suatu kelompok sasaran dengan memberi kesempatan kepada tiap anggota group. Tiap group dibatasi 6 – 8 orang untuk menghindari kurang fokusnya anggota group dalam membicarakan suatu topik dengan menggunakan beberapa prinsip dasar, yaitu antara lain (1) Belajar berpartisipasi dalam mengemukakan pertanyaan maupun memberikan jawaban, (2) Tim peneliti hanya sebagai

fasilitator, melemparkan masalah untuk didiskusikan dan dicari jalan keluarnya sendiri oleh anggota FGD, (3) Santai dan informal, (3) Menghargai perbedaan (demokratis), setiap anggota group memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pertanyaan atau memberi jawaban, (4) Triangulasi, semua jawaban diperiksa ulang, dan menggunakan multi disiplin untuk mengecek kebenaran jawaban, termasuk logis tidaknya jawaban dengan kenyataan.

Tim peneliti terdiri dari 3 orang, yang terbagi menjadi (1) fasilitator dan sekaligus pengarah jalannya diskusi, (2) penyelia atau pengamat (yang berada diantara anggota) yang memberi arahan atau mendorong anggota grup diskusi untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan jawaban, dan (3) Notulis, yang bertugas menulis secara cermat semua pertanyaan dan jawaban dalam proses diskusi. Bahan-bahan yang digunakan adalah (1) Kertas koran, (2) Spidol, ball poin (3) Daftar topik yang akan dibahas, (4) potongan-potongan kertas. Penggalan data dan informasi menyangkut kehidupan sosial ekonomi dan budaya, serta kelembagaan penyuluhan di wilayah studi, dilakukan secara mendalam terhadap anggota group diskusi. Data sekunder diperoleh dari instansi teknis pemerintah dan BPS.

Data dianalisis secara statistik sederhana dengan menggunakan sistem tabulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Identitas Petani Anggota Group

Group I di kampung Sota terdiri dari 8 anggota yang dihadiri juga oleh kaum perempuan dan pemuda yang umumnya berkisar antara 23 tahun sampai 68 tahun dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Tiap anggota group memiliki jumlah anggota keluarga (istri, anak, suami, ayah, ibu, dan saudara) berkisar antara 2 sampai 8 orang. Seluruhnya

adalah petani dengan pekerjaan sampingan berburu, menangkap ikan, serta menangkap penyu dan burung. Tiap rumah tangga memiliki lahan pekarangan yang berukuran sama 0,5 hektar karena merupakan pemukiman transmigrasi. Selain lahan pekarangan mereka pun memiliki lahan usaha 0,5 hektar dan lahan komunal milik marga seperti marga Ndiken dan Mbanggu. Lahan komunal umumnya berkisar antara 5-10 hektar dan berjarak kurang lebih 3-20 km dari lokasi pemukiman.

Group II di kampung Yanggandur terdiri dari 7 anggota yang dihadiri oleh kaum perempuan dan pemuda. Umur anggota grup II berkisar antara 31 -55 tahun. Dengan jumlah anggota keluarga berkisar antara 6-10 jiwa, pada umumnya pekerjaan utama mereka sebagai petani, dan kadang-kadang memungut hasil hutan. Lahan pekarangannya bervariasi antara 0,5 sampai 2 hektar karena bukan lokasi transmigrasi. Pemilikan lahan pada umumnya masih bersifat komunal luasnya 10-20 hektar yang berada dalam kawasan TNW. Jarak dari pemukiman ke lahan usaha berkisar antara 8 - 20 km. Hal ini menyebabkan untuk efisiensi waktu mereka membuat rumah di ladang, sehingga terkadang 3 -7 hari tinggal di ladang membuka ladang, menanam, dan membuat pagar. Untuk berburu kadang mereka tinggal di ladang selama sehari-hari.

Di kampung Yanggandur selama berlangsungnya pertemuan dalam group, kaum perempuan dan pemuda tidak banyak memberi masukan sekalipun diberi kesempatan. Sedang di kampung Sota pemuda juga banyak memberikan masukan. Disini nampak bahwa kaum perempuan sekalipun hadir dalam pertemuan jarang memberikan pendapat karena didominasi oleh kaum laki-laki. Kaum pemuda kurang memberikan suara karena mereka menganggap bahwa suara dari orang yang telah dituakan diantara mereka telah cukup mewakili.

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Suku Malin (Marin) Kanume di Distrik Sota

Distrik Sota memiliki jumlah penduduk 2.882 jiwa terdiri dari laki-laki 1.495 dan perempuan 1.338 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah setingkat kampung, yaitu Kampung Sota (translok), Sota transnas, Yanggandur, Rawa Biru, dan Wasur. Luas distrik Sota 2.766 km² dengan kepadatan penduduk 1,04 per km² (BPS, 2003). Distrik Sota berada di wilayah perbatasan dengan PNG (Papua Nugini) dan berada dalam kawasan TNW. Sebagai kawasan Taman Nasional, pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan dilaksanakan secara terbatas. Segala aktivitas pengambilan hasil hutan mendapat pengawasan ketat dari pemerintah (Dinas Kehutanan) dan LSM (WWF/YWL--Yayasan Wasur Lestari) dengan memberikan bea keluar untuk hasil hutan yang dibawa ke Merauke seperti daging rusa, burung, kulit buaya, kayu olahan, dan kayu bakar.

Dua kampung yang dipilih sebagai lokasi studi distrik Sota yaitu kampung Sota dan kampung Yanggandur. Kedua daerah ini memiliki keunikan sejarah tersendiri, penduduk kampung Sota sebagian besar adalah penduduk yang pernah menyeberang ke PNG karena terjadinya gejolak politik, sedang penduduk kampung Yanggandur adalah penduduk yang tetap bertahan di daerahnya. Berdasarkan hasil kajian BPS (1993) kampung Yanggandur dan Sota termasuk desa miskin di Kabupaten Merauke.

Penduduk asli kampung Sota umumnya adalah suku Malin Kanume berasal dari dusun Waya di Wilayah PNG yang setelah pemecahan menjadi bagian pemerintahan kolonial Inggris kira-kira tahun 1940-an. Sedang warga kampung Sota menjadi bagian pemerintah kolonial Belanda bersamaan dengan penyebaran agama Kristen Katolik pada tahun 1942. Pemerintahan kolonial ditandai dengan masih adanya pertanaman kelapa dan pohon jati di kampung Sota Lama. Sejak 1962 wilayah Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia. Namun pada tahun 1972 penduduk melakukan

mobilitas ke PNG, pemukiman yang ditempati sekarang merupakan lokasi transmigrasi yang dibuka tahun 1994 setelah mereka pulang kembali dari PNG. Sebagai lokasi transmigrasi selain suku Kanume dimukimkan juga pensiunan tentara dan polisi dari Merauke yang sebagian besar penduduk non Papua, dan juga transmigran asal Jawa. Suku Malin (Marin) terdiri dari beberapa suku-suku lagi seperti Malin Sosom, Malin Anim, dan lain-lain. Perbedaan terletak pada dialek bahasa, bahkan Malin Kanume, menurut penduduk asli distrik Sota ini mereka memiliki logat dan ragam bahasa yang berbeda sekali dengan saudara sesuku Malin yang lain.

Kampung Yanggandur berpenduduk asli suku Kanume terdiri dari 6 marga besar, yaitu (1) Gelambo, (2) Maiwa, (3) Mbanggu, (4) Intigwan, (5) Sanggra dan (6) Dimar. Pada Tahun 1972 Yanggandur berada dalam desa Sota yang terdiri atas kampung Sota, Yanggandur, dan Rawa Biru (Yerew) yang dalam perkembangannya kemudian ketiganya dimekarkan Tahun 1991 menjadi kampung-kampung yang definitif.

Acara adat istiadat menyangkut perkawinan, kematian, kelahiran dan kegiatan adat istiadat menyangkut usahatani seperti pembukaan lahan baru, penanaman, dan panen masih sering dilaksanakan di kedua kampung, menggunakan tanaman wati dalam ritual adat. Dalam adat, tanaman wati dianggap sebagai pembawa berkah. Setiap keluarga berusaha melakukan kegiatan ini untuk menjalin relasi dengan keluarga dan orang yang berada dalam satu suku yang sama. Barangkali ini bisa menjadi perekat sosial antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Sehingga jiwa kegotongroyongan tetap dijaga.

Menurut Anonimous (2000) masyarakat suku Marin (Malin) sudah lama mengenal transaksi jual beli, tetapi mereka tidak mengenal sistem tawar menawar dalam menjual hasil-hasil buminya. Hal ini menyebabkan mereka kurang ekonomis dalam bertransaksi, karena kurang memperhitungkan untung

rugi. Mungkin ini salah satu penyebab belum majunya ekonomi suku Malin dibanding transmigran nasional.

Struktur Sosial Masyarakat

Masyarakat suku Malin Kanume di kampung Sota dan Yanggandur orang-orang yang memahami betul adat-istiadat seperti para tua-tua sangat dihormati, akan tetapi tidak membentuk struktur sosial. Atau dapat dikatakan struktur sosial masyarakat Malin Kanume terbuka, sehingga siapa saja dalam setiap marga yang memiliki jiwa kepemimpinan dapat menjadi ketua adat atau pemimpin dalam masyarakatnya yang belakangan dikenal sebagai LMA (Lembaga Musyawarah Adat).

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dalam masyarakat adat suku Malin Kanume di kedua lokasi tidak jelas, sehingga boleh dikatakan tidak ada kelas sosial karena tingkat kehidupan mereka umumnya sama. Tidak ada yang memiliki taraf hidup yang lebih menonjol dibanding lainnya. Tidak ada hal yang membedakan satu marga dengan marga lainnya.

Mobilitas Penduduk

Mobilitas mereka dulu sangat tinggi ke PNG untuk mengunjungi keluarga, tetapi sekarang mereka juga kadang menjual 9 bahan pokok ke penduduk suku Malin Kanume saudara mereka dekat perbatasan di wilayah PNG. Sedang mobilitas penduduk untuk penjualan hasil pertanian seperti sayuran, ubi jalar, dan lain-lain dilakukan ke Merauke. Lebih jauh dari Merauke sebagian juga pernah ke Jayapura.

Karakteristik Petani

Petani suku Malin Kanume umumnya memiliki karakteristik usahatani yang sangat berbeda dengan petani transmigran asal Jawa. Mereka umumnya berusahatani dengan sistem tebas bakar dengan pengolahan tanah secara terbatas (*minimum tillage*), yaitu

melakukan penimbunan sekitar tanaman ubi jalar, gembili, singkong, dan lain-lain. Tetapi ada harapan bahwa dengan pemukiman bersama akan ada adopsi teknologi, terutama petani suku Malin Kanume bisa berusahatani padi karena mencontoh dari saudara mereka kaum transmigran nasional (*transnas*). Namun menurut mereka (penduduk lokal) usahatani padi yang mereka ikuti tidak berkembang karena tidak sesuai dengan budaya mereka.

Keragaan Usahatani

Kedua lokasi kampung Sota dan kampung Yanggandur berada dalam agroekosistem lahan kering dataran rendah (LKDR). Komoditas diusahakan adalah tanaman pangan jenis umbi-umbian terutama gembili sebagai makanan pokok, selain itu terdapat pula sagu yang tumbuh secara alami, yang biasanya diramu pula sebagai pangan.

Penguasaan lahan

Penguasaan lahan di kampung Sota ada sistem penguasaan individual dan penguasaan secara komunal. Penguasaan individual hanya terbatas pada lahan pekarangan dalam pemukiman transmigrasi yaitu rata-rata pemilikan 0,5 hektar (100 m x 50 m) yang telah disertifikasi. Sedang penguasaan secara komunal adalah lahan di luar lahan pemukiman baik berupa hutan tempat berburu, lahan usahatani yang diusahakan dengan sistem perladangan berpindah untuk komoditas pangan utama gembili dengan waktu berpindah setiap 2 tahun, dan belum disertifikasi. Untuk kampung Yanggandur umumnya penguasaan lahan secara komunal, tidak ada yang dikuasai secara individual baik lahan pekarangan maupun lahan usahatani, karena bukan wilayah transmigrasi.

Penguasaan lahan masyarakat Malin secara umum menurut Anonimous (2000), masyarakat ini memiliki falsafah sendiri sesuai adat istiadat dalam budaya mereka, yang sering menyulitkan orang luar yang mau berhubungan dengan mereka, jika berurusan dengan penguasaan tanah ulayat. Hal ini di satu

sisi dapat mempertahankan penguasaan atas tanah secara adat, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Akan tetapi penguasaan tanah ulayat secara ketat sering dianggap pemerintah sebagai salah satu kendala pembangunan, karena penduduk tidak bersedia memberikan tanah ulayat untuk pembangunan fasilitas umum.

Namun menurut kenyataan yang terjadi belakangan ini, sejak 1980-an, tanah-tanah yang dikuasai secara ulayat sudah banyak dijual kepada pihak lain di luar sistem sosial budaya mereka suatu kebiasaan baru dalam masyarakat Malin. Namun tanah-tanah ulayat mendapat perlindungan dari negara, sehingga masyarakat ulayat bisa memperoleh kompensasi yang layak, jika tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, pasar, gedung pemerintah, dan lain-lain. Atau masuk sebagai komoditas yang diperjual belikan.

Dukungan sarana produksi pertanian

Ketersediaan sarana produksi pertanian berupa peralatan parang, kampak, sekop, dan bibit/benih tanaman tersedia, karena hubungan yang lancar dengan kota Merauke. Pupuk dan pestisida sudah dikenal, namun belum dimanfaatkan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman di tingkat petani mengenai manfaat dan teknis pemakaian pupuk. Bibit ataupun benih beberapa tanaman lokal cukup tersedia diladang petani seperti gambi, tebu, dan ubi kayu.

Ketersediaan Infrastruktur

Untuk menghubungkan ibu kota kabupaten Merauke sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan sebagai pusat perekonomian dengan ibu kota distrik Sota telah dibangun jalan beraspal berjarak kira-kira 80 km dengan waktu tempuh kurang lebih 90 menit. Kampung Sota berada di pusat kota kecamatan. Sedang Yanggandur berjarak 18 km dari kota distrik, sedang ke pusat kota kabupaten berjarak 78 km. Dari jalan

utama Merauke-Sota menuju kampung Yanggandur masih berupa jalan tanah. Ini merupakan faktor penghambat dalam hal penjualan hasil tani ataupun hasil tangkapan. Selain itu juga sulit untuk memasukkan barang-barang lainnya dari luar.

Kelembagaan Usahatani dan Pengelolaan TNW

Kelembagaan usahatani berupa kelembagaan penyuluhan sudah terbentuk di lokasi studi terutama distrik, namun penyuluhan baru terbatas pada kunjungan PPL dari Kabupaten. Hal ini terkait dengan lokasi studi sebagai wilayah baru pemekaran distrik dan kampung. Kelembagaan lokal seperti sistem gotong royong masih dilaksanakan, sedang sistem sewa tenaga kerja juga sudah mulai dikenal karena berdampingan dengan transmigran nasional. Kegiatan gotong royong yang dilaksanakan meliputi pembukaan lahan, dan pembuatan pagar untuk mencegah masuknya babi hutan dan rusa. Pembuatan pagar dibuat bersusun yang terbuat dari bambu, agar babi tidak menggali tanah sekitar pagar, maka tanah sekitar pagar digali sebelum dibuatkan pagar.

Untuk menghubungkan teknologi dengan petani, lembaga penyuluhan biasanya melewati pemerintahan formal kampung. Namun belakangan LMA mulai dikenal dan dipercayai masyarakat, sehingga mungkin lembaga ini bisa menjadi salah satu saluran alternatif bagi introduksi teknologi pertanian ke kampung.

Menurut petani di kampung Yanggandur mereka telah memperoleh pembinaan dari WWF (*World Wide Fund*) yang kemudian dilanjutkan oleh Yayasan Almamater dan YWL (*Yayasan Wasur Lestari*). Ketiga LSM ini telah membina masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Wasur dengan berbagai program pengembangan usahatani. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan secara terbatas sumber daya alam dalam kawasan TNW, agar kelestariannya tetap terpelihara. Dengan demikian metode

penyuluhan juga memperhatikan faktor pelestarian lingkungan taman nasional.

Pengelolaan taman nasional yang bertujuan untuk melindungi ekosistem, menyelamatkan flora dan fauna dari kepunahan, dan membatasi pemanfaatan sumberdaya alam, ternyata sangat kompleks. Karena penetapan suatu ekosistem menjadi kawasan pelestarian alam tidak berarti kawasan tersebut akan terlindungi dari proses penghancuran habitat. Dalam pengelolaan taman nasional di setiap wilayah di Indonesia masing-masing mempunyai keunikan tersendiri.

Hasil kajian yang dilakukan Anshari, dkk (2005) pada Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) di kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan sebagai suaka marga satwa pada tahun 1982, dan baru pada tahun 1999 ditetapkan sebagai TNDS. Dan sejak 1994 TNDS terdaftar sebagai situs Ramsar, yang berarti komunitas internasional mengakui Danau Sentarum sebagai ekosistem lahan basah penting di dunia. Walaupun secara defacto Danau Sentarum dijadikan taman nasional oleh pemerintah, tetapi pengelolannya masih dilakukan masyarakat adat. Oleh karena itu dikuatirkan jika aturan-aturan adat tidak cukup tegas menahan laju eksploitasi yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, maka hal itu akan berdampak buruk terhadap keberadaan TNDS.

Anshari, dkk (2005) menyatakan pula bahwa untuk mengelola TNDS secara bertanggung jawab, maka aturan-aturan pengelolannya tidak menggunakan aturan-aturan dari luar seperti ketentuan pemerintah, melainkan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan masyarakat lokal yang dikenal sebagai aturan-aturan tradisional. Para pengelola TNDS sadar bahwa aturan-aturan tradisional yang berdampak positif terhadap pelestarian ekosistem TNDS sangat potensial bagi pengelolaan taman nasional secara berkelanjutan. Dengan melihat hal ini, maka pengelolaan TNW mungkin bisa

mengadopsi model pengelolaan seperti itu.

Komoditas yang diusahakan

Umumnya komoditas pangan yang diusahakan di pekarangan antara lain gembili, keladi, ubi jalar, ubi kayu, kacang panjang, sawi, dan lainnya. Untuk lahan usaha komunal komoditas lokal yang diusahakan antara lain gembili, ubi jalar, kelapa, dan sagu. Sagu ini merupakan sagu yang dibudidayakan. Untuk lokasi kampung Yanggandur telah diusahakan juga buah merah. Sedang komoditas tanaman tahunan yang diintroduksi seperti rambutan, kemiri, dan jeruk namun belum berkembang. Tanaman buah-buahan yang diusahakan antara lain mangga dan jeruk.

Hasil-hasil selain usahatani

Selain hasil-hasil usahatani, petani lokal di kedua lokasi studi ini pada umumnya meramu hasil hutan berupa daging babi hutan, daging rusa, tanduk rusa, ikan rawa, burung cenderawasih, burung nuri, kaka tua, kulit kayu gambir, dan kulit penyu. Untuk petani di Yanggandur mereka telah mengolah hasil minyak kayu putih. Pada umumnya hasil usahatani terutama gembili diusahakan untuk tujuan konsumsi sedang hasil-hasil hutan umumnya untuk dijual.

Kisaran pendapatan

Kisaran pendapatan petani baik dari usahatani (ubi jalar, sayur, pisang, jeruk, ayam, babi peliharaan) maupun hasil hutan (gambir, kulit buaya, kulit penyu, ikan segar, ikan asin, daging rusa atau babi segar, dendeng rusa, burung) di kedua lokasi berkisar antara Rp 300.000 - Rp 500.000/bulan/rumah tangga. Jika menggunakan angka pendapatan perkapita per bulan Rp 150.000 secara nasional (yang belakangan ini ditetapkan bagi keluarga miskin), maka pendapatan ini tentu masih rendah karena rata-rata tiap rumah tangga responden di kampung Sota memiliki 5 anggota keluarga (dari kisaran 2 sampai 8 orang), sehingga kisarannya pendapatannya Rp 60.000 -

pendapatannya Rp 37.500 - Rp 62.500/bln/kapita.

Jika mengikuti perkembangan yang terjadi selarang ini, maka berdasarkan pendapatan ini petani di kedua lokasi pengkajian dapat dikategorikan penduduk miskin dan kondisi ini masih membenarkan hasil analisis desa miskin yang dilakukan BPS bekerja sama dengan Bappeda Irian Jaya (1993) bahwa kampung Sota dan Yanggandur bersama dua kampung lain yaitu Rawa Biru dan Wasur tergolong desa miskin di wilayah ini. Sehingga perlu upaya untuk memajukannya.

Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan penyuluhan pertanian di kedua lokasi studi sudah diterapkan metode latihan dan kunjungan (Laku) menurut informasi dari instansi teknis, akan tetapi kunjungan petugas dinilai petani jarang melakukan penyuluhan. Mereka merasa yakin bahwa mereka akan berhasil jika diberi petunjuk mengenai penanaman dan pemeliharaan tanaman yang bibitnya dibagikan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk berusahatani, dengan memberikan penekanan pada pemenuhan bahan makanan pokok.

Petani lokal di kampung Sota pernah dibina juga untuk menanam padi seperti transmigran nasional, akan tetapi sebagian besar dari mereka merasa tidak bisa mengolah tanah, karena menurut mereka itu terasa sangat berat. Menurut petani lokal, itu semacam pemaksaan budaya karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang mereka jalani. Sehingga mereka masih tetap berusahatani dengan pola usahatani tradisional sistem perladangan berpindah dengan komoditas utama gembili dan komoditas lain seperti tebu, pisang, ubi jalar, ubi kayu. Sistem usahatani berpindah ini terkait dengan makin berkurangnya hara tanah karena tanaman tersebut sangat rakus hara.

Saat penelitian ini berlangsung petani merasa kurang mendapat perhatian dalam penyuluhan pertanian, karena bibit tanaman yang dibagikan

seperti bibit kemiri, rambutan, dan mangga selama ini tidak dikembangkan. Alasannya karena tidak dibimbing oleh penyuluh. Dan program penanaman kemiri yang ternyata tidak berhasil di kampung Sota membuat mereka kuatir nantinya kurang diperhatikan karena telah melalaikan program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa petani cukup sadar bahwa kegagalan mereka dalam menjalankan program pemerintah, ini berdampak kepada kelanjutan pembangunan di kampungnya. Sehingga mereka selalu berusaha menjalankannya asalkan sesuai dengan kemampuan mereka dan terutama sekali budaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyuluhan

Penyuluhan yang selama ini dijalankan pada masyarakat suku Kanume dinilai belum efektif karena banyak faktor. Dalam pengkajian ini ada tiga faktor yang bisa teridentifikasi, yaitu (1) kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan petani, (2) belum adanya program penyuluhan yang tepat untuk masyarakat lokal, dan (3) bahan atau materi apa yang perlu disuluhkan kepada petani lokal belum ditetapkan. Ketiga faktor tersebut telah diidentifikasi dalam kegiatan ini dengan berdasarkan pemahaman bahwa teknologi yang hendak disuluhkan benar-benar merupakan kebutuhan petani saat ini dan memiliki prospek untuk berkembang di masa mendatang. Selain itu dari sisi yang akan memberi penyuluhan bahan-bahan yang diperlukan benar-benar bisa diaktualisasikan penerapannya di lapangan dengan metode yang tepat.

Dalam mengembangkan metode penyuluhan, efektifitas penyuluhan ditentukan oleh metode yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Anonimous, 2001): (1) mengembangkan perhatian petani, (2) mengembangkan minat petani, (3) mengembangkan kepercayaan petani, (4) mengembangkan hasrat petani, (5) mengembangkan tindakan petani, dan (6) memberikan kepuasan kepada petani. Dengan demikian pengembangan

mengembangkan tindakan petani, dan (6) memberikan kepuasan kepada petani. Dengan demikian pengembangan metode penyuluhan di distrik Sota perlu juga memperhatikan aspek-aspek ini.

Alternatif Model Penyuluhan Pertanian di Wilayah Perbatasan dan Taman Nasional

Sesuai dengan hasil *brain storming* terhadap permasalahan yang dihadapi petani yang didasarkan pada kondisi lingkungan alam, waktu tanam, waktu berburu, waktu pelaksanaan kegiatan adat istiadat, keterikatan sosial antar marga, atau keterikatan sosial dalam marga yang berlaku pada wilayah tersebut yang dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung, yang meliputi kelembagaan pemerintah (penyuluhan pertanian), LSM, lembaga ekonomi Bank untuk fasilitas per kreditan, toko penyedia sarana produksi, dan pasar penampung hasil-hasil pertanian. Maka untuk kedua wilayah studi yang berada tidak jauh dari kota kabupaten sebagai pusat perekonomian yang dapat dijangkau dengan jalan darat dengan waktu tempuh hanya kurang lebih 1 jam dari kota distrik, sehingga yang diperlukan adalah komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menjawab masalah pembangunan pertanian mereka.

Dan juga dengan memperhatikan kondisi alam dapat menjadi dasar untuk penyusunan model penyuluhan yang sesuai bagi pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomi di distrik Sota, maka setiap kegiatan usaha pertanian diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama karena daerah pemukiman suku Malin Kanume ini berada dalam wilayah TNW.

Sejalan dengan kasus penyuluhan pertanian di daerah terbelakang termasuk daerah pinggiran Merauke ini, yang menurut Joan Tully (1971) dalam Anonimus (2001), teknik penyuluhan pertanian di kepulauan Pasifik (Fiji dan Samoa) dipengaruhi oleh budaya setempat. Budaya pertanian maju dari Barat diperbandingkan dengan penduduk asli Pasifik, sehingga terlihat beberapa perbedaan yang meliputi: (1)

ikatan keluarga, (2) nilai, (3) struktur sosial, (4) motivasi, dan (5) kepemimpinan. Perbedaan ke-5 hal itu dalam masyarakat lokal yang berbudaya Timur dengan masyarakat Barat atau untuk kasus Sota kaum transmigran nasional yang lebih dulu maju dengan transmigran lokal yang belum maju, tidak bisa dipaksakan untuk berasimilasi dengan cepat yang memungkinkan penduduk lokal cepat maju peradabannya. Karena menurut pengalaman pada masa lampau pemaksaan budaya telah menyebabkan kemunduran (Lucas, 1993), sehingga malah menyebabkan mereka lebih terbelakang lagi karena bisa saja mereka merasa terasing dengan budaya mereka sendiri, sementara budaya baru belum bisa mengubah hidup mereka. Oleh karena itu perubahan itu hendaknya dimulai dari diri mereka sendiri.

Anonimus (2001) melaporkan tentang penyuluhan pertanian bagi suku-suku terasing di negara tetangga PNG. PNG telah melakukan penelitian untuk menemukan komoditas pertanian yang sesuai bagi lingkungan alam dan bernilai ekonomi, setelah itu mereka juga meneliti tentang pola hidup suku terasing dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial dengan metode partisipasi dan observasi. Hasilnya sekalipun mereka kesulitan tenaga penyuluh, tetapi suku-suku terasing mereka telah berusaha menanam tanaman lokal yang dianjurkan karena pemerintah PNG menjamin penjualan hasil dengan harga yang menguntungkan petani. Barangkali keberhasilan perdagangan hasil pertanian yang difasilitasi pemerintah ini dapat menjadi contoh, karena umumnya hasil pertanian yang tinggi yang dicapai petani kita sebagai dampak dari adanya usaha penyuluhan, seringkali tidak mendapat pasar yang layak.

Berdasarkan kondisi faktual distrik Sota yang berada di wilayah perbatasan dengan PNG, agar tidak terjadi kerawanan sosial-politik, maka pengembangan pertanian ini perlu didorong untuk mensejahterakan petani, bahkan bila perlu dengan menjalin

kerjasama ekonomi dengan PNG untuk menjaga kestabilan di wilayah perbatasan itu.

Metode penyuluhan dan perekrutan tenaga penyuluh

Metode penyuluhan latihan dan kunjungan (laku) masih diinginkan oleh petani, karena petani masih perlu pendampingan akan tetapi mungkin perlu dimodifikasi. Pendekatan kelompok dapat dipakai dengan mendekati setiap marga/klan. Hal ini terkait dengan sistem kepemilikan lahan yang masih bersifat komunal atau milik marga. Jika tidak bisa mendekati masyarakat lewat setiap marga karena terlalu banyak marga, maka keterlibatan setiap anggota marga untuk mewakili kelompoknya harus diperhatikan dalam setiap pembinaan yang melibatkan kelompok yang terbatas.

Pendekatan dengan kegiatan sekolah lapang, demonstrasi plot, kunjungan masih diharapkan petani, dan perlu juga sistem magang. Akan tetapi perlu perhatian terhadap petugas lapangan. Khusus untuk perekrutan tenaga penyuluh, pemda harus benar-benar memilih petugas yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas pendampingan terhadap petani. Oleh karena itu diharapkan tenaga penyuluh direkrut dari putra daerah yang telah berpendidikan SPMA. Selain itu jika petugas lapangan ini jumlahnya masih dianggap kurang oleh pemerintah maka perlu ditambah, sesuai kemampuan finansial pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Materi Penyuluhan

Sesuai dengan kesepakatan suku Kanume materi penyuluhan harus menyangkut komoditas pangan lokal seperti tanaman gambeli sebagai pangan pokok. Sedang untuk meningkatkan ekonomi pengembangan komoditas sayuran dan buah-buahan seperti vetsai, terong, kacang panjang, kol, jeruk, mangga, dan lain-lain. Selain itu penyuluhan juga perlu menyiapkan materi penyuluhan menyangkut

pengembangan komoditas asli seperti wati, buah merah, yang saat ini memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Wati selalu dibutuhkan suku Malin dalam setiap acara adat istiadat sehingga memiliki nilai ekonomi, begitu juga dengan buah merah dan minyak kayu putih yang permintaannya cukup tinggi.

Menurut petani hasil produksi tanaman pangan lokal gambeli produksinya sudah sangat menurun dibanding dulu, faktor yang mempengaruhi produksi gambeli adalah waktu tanam. Sedang tanaman wati sekarang sudah sangat jarang ditemui. Hal ini menjadi pertimbangan untuk perlunya dilakukan penelitian dan pengembangan menyangkut komoditas lokal termasuk buah merah. Begitu juga dengan tanaman minyak kayu putih.

Peningkatan ekonomi melalui penyuluhan pertanian diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku produktif melalui pengembangan usahatani yang akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada hasil hutan yang tentunya berdampak terhadap kelestarian kawasan Taman Nasional. Namun produktivitas pertanian tidak semata-mata membutuhkan input dari luar yang terkait dengan introduksi teknologi baru yang dikenal sebagai revolusi hijau. Karena menurut Soestrisno (2002) revolusi hijau menyebabkan para petani kita harus membeli teknologi pertanian baru dengan harga yang mahal, yang sering diikuti penyediaan kredit. Kredit tersebut kemudian menjadi beban yang tidak ringan bagi petani sebagai akibat penggunaan teknologi baru. Memang produksi pertanian meningkat karena penggunaan teknologi baru, tetapi model revolusi hijau ini bukan sistem yang berkelanjutan. Hal itu terlihat dari revolusi hijau yang menyebabkan Indonesia swasembada beras tetapi hanya 5 tahun, setelah itu Indonesia harus menjadi importir beras terbesar, karena banyak petani kegagalan panen, karena teknologi benih padi yang digunakan rentan terhadap serangan hama. Hal ini berimplikasi pada input biaya tinggi yang melilit petani dengan utang kredit.

Untuk itu Soetrisno (2002) juga mengusulkan agar peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya berdasarkan input dari luar, tetapi juga mengembangkan input lokal terutama bibit atau benih komoditas lokal. Dengan demikian materi penyuluhan untuk penduduk lokal Merauke (suku Malin Kanume) juga perlu memperhatikan input yang berasal dari sumberdaya lokal mereka sendiri. Agar selain tidak menyebabkan mereka tergantung dari teknologi luar, perkembangan pertanian spesifik lokal dapat berkembang dari input teknologi yang dikembangkan sumberdaya mereka sendiri, yang barangkali lebih sehat karena tidak banyak menggunakan teknologi berbahan kimiawi yang umumnya berasal dari luar

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian model penyuluhan ini, di temui fakta bahwa model penyuluhan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Sota Kabupaten Merauke belum efektif, karena terbukti belum mampu meningkatkan produksi, sehingga pendapatan petani juga masih rendah. Bahkan masih tergolong miskin dengan kisaran pendapatan Rp 60.000 - Rp 100.000/bln/kapita di kampung Sota dan Rp 37.500 - Rp 62.500/bln/kapita untuk kampung Yanggandur.

Oleh karena itu memang perlu dipikirkan kembali metode penyuluhan yang sesuai bagi masyarakat lokal. Metode penyuluhan yang sesuai memang harus diangkat dari budaya masyarakat itu sendiri. Namun melihat dari permasalahan yang dihadapi masyarakat petani di lokasi studi persoalan tidak terletak pada kesalahan metode, tetapi implementasi program karena masih banyak keterbatasan-keterbatasan pemerintah. Sehingga persoalannya terletak pada pembenahan manajemen dan rekrutmen tenaga penyuluh agar terdistribusi dalam wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP). Namun hal itu tentu tergantung dari kemampuan

pemerintah dalam membiayai birokrasi pemerintahannya.

Saran

Jika pemerintah merasa tidak mampu membiayai penyuluhan pertanian atau karena terlalu banyak pekerjaan lain yang menyita tugas penyuluh yang dibiayai pemerintah, maka pemerintah dapat memberi kesempatan kepada pihak non pemerintah (NGO) seperti LSM yang telah bergerak dalam pengembangan masyarakat di sana, untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan dengan model kemitraan dalam kawasan Taman Nasional Wasur dan sepanjang wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga PNG. Bentuk kemitraannya seperti apa dapat dibicarakan antara pemerintah dan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2000. *Identifikasi Hukum Adat Marind, Daerah Persekutuan Hukum Adat Marind-Sosom di Imbuti, Urumb, Yatomb dan Matara*. Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kabupaten Merauke. Merauke.
- _____. 2001. *Penyuluhan Pertanian*. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta.
- Anshari, G.S., Zulkifli, dan N. W. Handayani. 2005. *Aturan-Aturan Tradisional: Basis Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum*. Yayasan Konservasi Borneo (YKB) bekerjasama dengan NC-IUCN (The World Conservation Union). Penerbit Wana Aksara. Tangerang.
- BP3D Papua. 2002. *Profil Pembangunan Pertanian Propinsi Papua*. Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Provinsi Papua. Jayapura

BPS. 2003. *Merauke dalam Angka*. Kantor Statistik Kabupaten Merauke. Merauke.

BPS. 1993. *Analisis Desa Miskin Propinsi Irian Jaya*. Kerjasama Bappeda Propinsi Daerah Tk. I Irian Jaya dengan Kantor Statistik BPS Irian Jaya. Jayapura.

Hubeis, A.V.S., P. Tjitropranoto, dan W. Ruwiyanto. 1995. *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.

Lucas, Henry S. 1993. *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*. Disadur dan diterjemahkan Sugihardjo Sumobroto dan Budiawan dari buku aslinya: *A Short History of Civilization*. Penerbit PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Mukmin, Usman. 1995. *Peranan Penyuluhan Pembangunan dalam Pelestarian Sumber Daya Alam dalam Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI* (eds) Hubeis, A.V.S., P. Tjitropranoto, dan W. Ruwiyanto. PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.

Soegijoko, S. 1994. *Percepatan Pembangunan Daerah. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta.

Soetrisno, L. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.